

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



JL. Yahim No. 49 Sentani Jayapura Papua

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

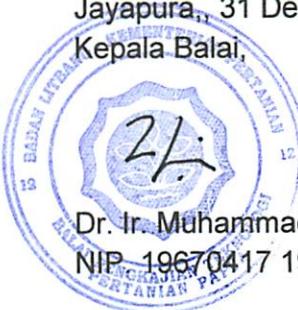
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jayapura,, 31 Desember 2018

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si

NIP. 19670417 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Penggerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional**
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**
 - D.2. Beban Pegawai**
 - D.3. Beban Persediaan**
 - D.4. Beban Barang dan Jasa**
 - D.5. Beban Pemeliharaan**
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas**
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**
 - D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**
 - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**
 - E.1. Ekuitas Awal**
 - E.2. Surplus/Defisit-LO**
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**
 - E.4.1. Koreksi Lain-lain**
 - E.4.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**
 - E.4.3. Koreksi Nilai Persediaan**
 - E.4.4. Penyesuaian Nilai Aset**
 - E.4.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap**
 - E.5. Transaksi Antar Entitas**
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**
 - E.6. Ekuitas Akhir**
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya**
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura,, 31 Desember 2018

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP. 19670417 199503 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp254.916.709,00 atau mencapai 607,67% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp41.950.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp17.709.291.437,00 atau mencapai 99,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.770.543.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.499.053.348,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp60.844.269,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.416.050.994,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp20.629.335,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.528.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.499.053.348,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp58.364.070,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.766.020.442,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13.707.656.372,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp546.713.941,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-13.160.942.431,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp27.141.711.097,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-13.160.942.431,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp63.909.954,00 dan ditambah

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.454.374.728,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp31.499.053.348,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	41.950.000,00	254.916.709,00	607,67	57.318.750,00
Jumlah Pendapatan		41.950.000,00	254.916.709,00	607,67	57.318.750,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.743.254.000,00	4.738.771.645,00	99,91	4.429.868.141,00
Belanja Barang	B.4.	7.721.139.000,00	7.666.609.177,00	99,29	8.184.289.919,00
Belanja Modal	B.5.	5.306.150.000,00	5.303.910.615,00	99,96	2.130.946.309,00
Jumlah Belanja		17.770.543.000,00	17.709.291.437,00	99,66	14.745.104.369,00

II. NERACA

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
C.1.1.	36.617.356,00	0,00	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	-183.087,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	24.410.000,00	8.650.000,00
Jumlah Aset Lancar		60.844.269,00	8.650.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	7.786.174.000,00	7.786.174.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6.884.291.026,00	6.199.723.866,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	21.489.702.764,00	16.958.811.837,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	850.210.406,00	850.210.406,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	123.722.971,00	123.722.971,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	125.199.972,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7.	-4.900.655.911,00	-4.507.391.605,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7.	-621.440.644,00	-238.250.286,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7.	-195.953.618,00	-104.287.610,00
Jumlah Aset Tetap		31.416.050.994,00	27.193.913.551,00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	20.733.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	-103.665,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		20.629.335,00	0,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	102.073.000,00	310.265.400,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3.	-102.073.000,00	-374.175.354,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-4.586.250,00	-3.057.500,00
Jumlah Aset Lainnya		1.528.750,00	-60.852.454,00
Jumlah Aset		31.499.053.348,00	27.141.711.097,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	31.499.053.348,00	27.141.711.097,00
Jumlah Ekuitas		31.499.053.348,00	27.141.711.097,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		31.499.053.348,00	27.141.711.097,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	58.364.070,00	18.937.012,00
JUMLAH PENDAPATAN		58.364.070,00	18.937.012,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.738.771.645,00	4.429.868.141,00
Beban Persediaan	D.3.	2.302.541.889,00	2.118.062.820,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.350.758.568,00	3.077.067.250,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	610.824.145,00	635.540.150,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.682.479.021,00	2.371.950.669,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.080.358.422,00	858.927.609,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	286.752,00	0,00
JUMLAH BEBAN		13.766.020.442,00	13.491.416.639,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13.707.656.372,00	-13.472.479.627,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	23.375.000,00	33.489.500,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	2.943.500,00	220.667.500,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	596.747.511,00	72.232.688,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	70.465.070,00	65.142.150,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		546.713.941,00	-180.087.462,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-13.160.942.431,00	-13.652.567.089,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	27.141.711.097,00	16.782.430.288,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-13.160.942.431,00	-13.652.567.089,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2.	63.909.954,00	-2.355.878.750,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.3.	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.4.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.5.	0,00	11.670.989.779,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	17.454.374.728,00	14.696.736.869,00
EKUITAS AKHIR		31.499.053.348,00	27.141.711.097,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tanggal 1 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi di wilayah papua.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi
3. Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk menyusun materi penyuluhan
4. Pelayanan teknis kegiatan pengkajian, penelitian perakitan teknologi pertanian dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua telah menetapkan kebijakan teknis adalah sebagai berikut :

1. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemaju lingkungan pembangunan pertanian di wilayahnya semakin meningkat seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah.
2. Kegiatan sektor pertanian di daerah belum sepenuhnya berbasis pada penerapan inovasi pertanian yang benar meskipun telah tersedia di unitingkup Badan Litbang Pertanian
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan proses produksi dan distribusi inovasi pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat guna
4. Perlindungan komersialisasi hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berdampak pada kegairahan menemukan inovasi pertanian yang lebih produktif

Dengan telah ditetapkan beberapa program tersebut kebijakan teknis untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian papua berkomitmen dengan visi misi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Visi

Pada tahun 2014 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papau menjadi lembaga Pengkajian terunggul dan profesional dalam menghasilkan dan menyediakan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi papua

Misi

Untuk mencapai visi tersebut Balai Pengkajian Teknologi Pertaniaqn Papua mempunyai misi sebagai berikut

1. Menghasilkan dan mengembangkan inofasi teknologi pertanian spesifik lokasi sesuai dinamika kebutuhan pengguna
2. Mempercepat desiminasi pertanian spesifik lokasi kepada pengguna serta umpan balik dan stek holder untuk perbaikan teknologi spesifik lokasi dan
3. Memperkuat jejaring kerja sama lintas intitusi baik pada tingkat regional maupun nasional guna pembangunan teknologi pertanian spesifik lokasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.250.000,00	8.250.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	33.700.000,00	33.700.000,00
Jumlah Pendapatan	41.950.000,00	41.950.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.589.745.000,00	4.654.542.000,00
Belanja Lembur	88.712.000,00	88.712.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	187.193.000,00	0,00
Belanja Barang Operasional	667.330.000,00	554.970.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.362.990.000,00	1.521.554.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.602.044.000,00	2.150.106.000,00
Belanja Jasa	457.900.000,00	293.100.000,00
Belanja Pemeliharaan	439.110.000,00	513.610.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.397.450.000,00	2.687.799.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	925.000.000,00	899.550.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.439.600.000,00	4.406.600.000,00
Jumlah Belanja	20.157.074.000,00	17.770.543.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp254.916.709,00 atau mencapai 607,67% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp41.950.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.652.140.645,00	4.367.813.186,00	6,51
Belanja Lembur	88.706.000,00	63.535.000,00	39,62
Jumlah Belanja Kotor	4.740.846.645,00	4.431.348.186,00	6,98
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.075.000,00	-1.480.045,00	40,20
Jumlah Belanja	4.738.771.645,00	4.429.868.141,00	6,97

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.666.609.177,00 dan Rp8.184.289.919,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar -6,33% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh: adanya revisi DIPA dari Dipa awal Rp. 20.157.074.000,- menjadi Rp. 17.770.543.000,-

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	554.969.672,00	659.790.000,00	-15,89
Belanja Barang Non Operasional	1.515.073.411,00	2.084.283.350,00	-27,31
Belanja Barang Persediaan	2.119.798.925,00	2.306.317.850,00	-8,09
Belanja Jasa	280.715.485,00	333.993.900,00	-15,95
Belanja Pemeliharaan	513.572.663,00	448.954.150,00	14,39
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.682.479.021,00	2.371.950.669,00	13,09
Jumlah Belanja Kotor	7.666.609.177,00	8.205.289.919,00	-6,57
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-21.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	7.666.609.177,00	8.184.289.919,00	-6,33

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.303.910.615,00 dan Rp2.130.946.309,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 148,90% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh: adanya pembangunan gedung kantor yang baru

**Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	898.219.660,00	960.402.500,00	-6,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.405.690.955,00	1.170.543.809,00	276,38
Jumlah Belanja Kotor	5.303.910.615,00	2.130.946.309,00	148,90
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.303.910.615,00	2.130.946.309,00	148,90

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp898.219.660,00 dan Rp960.402.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami penurunan sebesar -6,47% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penghapusan peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor dll.

**Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	898.219.660,00	960.402.500,00	-6,47
Jumlah Belanja Kotor	898.219.660,00	960.402.500,00	-6,47
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	898.219.660,00	960.402.500,00	-6,47

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.405.690.955,00 dan Rp1.170.543.809,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 276,38% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya pembangunan gedung kantor

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

**Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.405.690.955,00	1.170.543.809,00	276,38
Jumlah Belanja Kotor	4.405.690.955,00	1.170.543.809,00	276,38
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.405.690.955,00	1.170.543.809,00	276,38

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.617.356,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Petrus Alexander Beding, SP,MSc	19.650.000,00	0,00
2.	Sudarsono SP	9.250.000,00	0,00
3.	Adnan, SP,M.Si	7.717.356,00	0,00
Jumlah		36.617.356,00	0,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-183.087,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0.5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.410.000,00 dan Rp8.650.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	150.000,00	8.650.000,00
Suku Cadang	4.850.000,00	0,00
Bahan Baku	19.410.000,00	0,00
Jumlah	24.410.000,00	8.650.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.786.174.000,00 dan Rp7.786.174.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.884.291.026,00 dan Rp6.199.723.866,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	6.199.723.866,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	898.219.660,00
Reklasifikasi Masuk	135.603.584,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	25.494.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	-48.071.000,00
Reklasifikasi Keluar	-135.603.584,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-191.075.500,00
Saldo per 31 Desember 2018	6.884.291.026,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-4.900.655.911,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.983.635.115,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Adanya pengadaan pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor ...

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21.489.702.764,00 dan Rp16.958.811.837,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	16.958.811.837,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	4.530.890.927,00
Saldo per 31 Desember 2018	21.489.702.764,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-621.440.644,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	20.868.262.120,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa: Adanya pembangunan gedung kantor yang baru..

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp850.210.406,00 dan Rp850.210.406,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp123.722.971,00 dan Rp123.722.971,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp125.199.972,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-5.718.050.173,00 dan Rp-4.849.929.501,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6.884.291.026,00	-4.900.655.911,00	1.983.635.115,00
2.	Gedung dan Bangunan	21.489.702.764,00	-621.440.644,00	20.868.262.120,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.210.406,00	-195.953.618,00	654.256.788,00
4.	Aset Tetap Lainnya	123.722.971,00	0,00	123.722.971,00
Akumulasi Penyusutan		29.347.927.167,00	-5.718.050.173,00	23.629.876.994,00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.733.000,00 dan Rp0,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Petrus Alexander Beding, SP,MSc	19.650.000,00	0,00
2.	Sudarsono SP	9.250.000,00	0,00
3.	Adnan, SP,M.Si	7.717.356,00	0,00
Jumlah		36.617.356,00	0,00

C.3.2. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-103.665,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0.5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.4.2. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp102.073.000,00 dan Rp310.265.400,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-106.659.250,00 dan Rp-377.232.854,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-4.586.250,00	1.528.750,00
2.	Aset Lain-lain	102.073.000,00	-102.073.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		108.188.000,00	-106.659.250,00	1.528.750,00

C.6. EKUITAS

C.6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.499.053.348,00 dan Rp27.141.711.097,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.364.070,00 dan Rp18.937.012,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	2.050.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.800.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	39.583.500,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.980.570,00	16.887.012,00	0,55
Jumlah	58.364.070,00	18.937.012,00	208,20

Terdapat kenaikan sebesar 208,20% bila dibandingkan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.738.771.645,00 dan Rp4.738.771.645,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.060.244.960,00	2.882.023.300,00	6,18
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.474,00	40.463,00	22,27
Beban Tunj. Anak PNS	66.656.374,00	60.079.970,00	10,95
Beban Tunj. Beras PNS	152.951.040,00	149.112.780,00	2,57
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	354.100.000,00	327.300.000,00	8,19
Beban Tunj. PPh PNS	19.415.517,00	17.536.378,00	10,72
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000,00	7.020.000,00	7,69
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	180.274.280,00	159.274.250,00	13,18
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	350.355.000,00	331.425.000,00	5,71
Beban Tunjangan Umum PNS	110.320.000,00	101.560.000,00	8,63
Beban Uang Lembur	88.706.000,00	63.535.000,00	39,62
Beban Uang Makan PNS	346.639.000,00	329.461.000,00	5,21
Jumlah	4.738.771.645,00	4.429.868.141,00	6,97

Bila melihat tabel di atas maka beban pegawai per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,97% bila dibandingkan 31 Desember 2017 ini disebabkan karna adanya pengangkatan pewai ASN yang baru.

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.302.541.889,00 dan Rp2.118.062.820,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1.290.764.061,00	1.251.517.100,00	3,14
Beban Persediaan konsumsi	727.488.373,00	687.980.720,00	5,74

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban persediaan lainnya	284.289.455,00	178.565.000,00	59,21
Jumlah	2.302.541.889,00	2.118.062.820,00	8,71

Kalau melihat tabel diatas maka beban persediaan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,71% bila di bandingkan dengan 31 Desember 2017

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.350.758.568,00 dan Rp3.077.067.250,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	20.000.000,00	-100,00
Beban Bahan	987.278.411,00	1.319.987.350,00	-25,21
Beban Barang Non Operasional Lainnya	456.295.000,00	674.650.000,00	-32,37
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	152.520.000,00	146.280.000,00	4,27
Beban Honor Output Kegiatan	71.500.000,00	68.646.000,00	4,16
Beban Jasa Profesi	99.900.000,00	145.400.000,00	-31,29
Beban Keperluan Perkantoran	402.449.672,00	513.510.000,00	-21,63
Beban Langganan Air	17.897.352,00	22.529.800,00	-20,56
Beban Langganan Listrik	132.560.433,00	138.811.300,00	-4,50
Beban Langganan Telepon	30.357.700,00	27.252.800,00	11,39
Jumlah	2.350.758.568,00	3.077.067.250,00	-23,60

Bila dibandingkan 31 Desember 2018 beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 23,60% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017.

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp610.824.145,00 dan Rp635.540.150,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	324.200.000,00	246.600.000,00	31,47
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.372.663,00	202.354.150,00	-6,42
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59.624.535,00	129.096.000,00	-53,81
Beban Persediaan suku cadang	37.626.947,00	57.490.000,00	-34,55
Jumlah	610.824.145,00	635.540.150,00	-3,89

Bila dibandingkan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar -3,89%

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.682.479.021,00 dan Rp2.371.950.669,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	2.554.731.235,00	2.279.482.787,00	12,08
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.747.786,00	92.467.882,00	38,15
Jumlah	2.682.479.021,00	2.371.950.669,00	13,09

Kalau di lihat dari tabel diatas maka beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 13,09% bila di bandingkan per 31 desember 2018 dan 31 Desember 2017.

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.080.358.422,00 dan Rp858.927.609,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	1.528.750,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	383.190.358,00	264.516.323,00	44,86
Beban Penyusutan Irigasi	64.778.074,00	34.381.537,00	88,41
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.902.334,00	12.951.167,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	985.600,00	985.600,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.557.500,00	2.207.853,00	-29,46
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	602.415.806,00	542.356.379,00	11,07
Jumlah	1.080.358.422,00	858.927.609,00	25,78

Kalau melihat tabel di atas maka beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 25,78% kalau di bandingkat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

D.8. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp286.752,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	183.087,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	103.665,00	0,00	0,00

Jumlah	286.752,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------

Kalau melihat tabel diatas maka beban penyisihan piutang tak tertagih mengalami kenaikan bila di bandingkan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

D.9. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-2.943.500,00	-220.667.500,00	-98,67
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-70.465.070,00	-65.142.150,00	8,17
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	67.317.800,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	328.719.516,00	67.340.450,00	388,15
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	37.500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	23.375.000,00	33.489.500,00	-30,20
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	95.607.954,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	10.825.207,00	4.892.086,00	121,28
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56.777.034,00	152,00	37.353.211,84
Jumlah	546.713.941,00	-180.087.462,00	-403,58

Kalau melihat tabel di atas maka pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 bila di bandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.141.711.097,00 dan Rp16.782.430.288,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-13.160.942.431,00 dan Rp-13.652.567.089,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp63.909.954,00 dan Rp9.315.111.029,00.

E.4.1. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp63.909.954,00 dan Rp-2.355.878.750,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	63.909.954,00
Peralatan dan Mesin	0,00
Jumlah	63.909.954,00

E.4.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.5. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.670.989.779,00.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.454.374.728,00 dan Rp14.696.736.869,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.709.291.437,00
Diterima dari Entitas Lain	-254.916.709,00
Jumlah	17.454.374.728,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-254.916.709,00 sedangkan DKEL sebesar Rp17.709.291.437,00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.499.053.348,00 dan Rp27.141.711.097,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Tahun 2018 BPTP Papua mendapat dana untuk merenovasi gedung kantor yang lebih prefentif

Pada Tahun Anggaran 2018 BPTP mengalami beberapa kali Revisi dari DIPA awal Rp. 20.157.074.00 menjadi Rp. 17.770.543.000,-

Sampai dengan 31 Desember 2018 BPTP Papua telah mengalami 7 kali Revisi DIPA dan POK yaitu pada tanggal 2 Mei 2018, 4 Juni 2018, 18 September 2018, 18 Oktober 2018 6 November 2018 30 November 2018 dan 27 Desember 2018

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada Tahun ini juga tepatnya di bulan Maret 2018 terjadi pergantian KPA yaitu dari Ir. Yuliantoro Baliadi, MS kepada Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
- Terdapat TGR senilai Rp. 68.882.800,- pada kenyataan dari nilai tersebut telah melunasi senilai Rp. 32.265.444,- dan masih sisa yang belum di setor sebesar Rp. 36.617.356,-



SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir, Muflin Nggobe, M.Si
Jabatan : Pejabat Penanda Tangan SPM
Satker : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
Alamat : Jalan Yahim No. 49, Sentani, Jayapura

Dengan ini secara bersama mengikatkan diri dan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Surat Tugas Nomor R.299/PW.130/G.4/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 atas pengelolaan anggaran yang menimbulkan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) yang tertunda dan kerugian Negara pada DIPA/RKA KL Satker BPTP Provinsi Papua, berupa :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional selama 10 bulan akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit An.Petrus Alexander Beeding, SP	15.650.000,-
2	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja selama 8 bulan akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit An.Sudarmo SP	16.467.000,-
3	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja selama 8 bulan akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit An. Petrus Alexander Beeding SP. MSc	17.860.800,-
4	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional selama 10 bulan akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit. An. Petrus Alexander Beeding SP. MSc	18.905.000,-

Pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) yang tertunda dan Kerugian Negara akan disetor ke Kas Negara dalam waktu secepatnya dan paling lambat 15 hari setelah surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini, jika ada kesalahan ketulianya atau kesalahan dalam penulisan, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas perbedaan yang terjadi. tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jayapura, 25 Juli 2018

Yang membuat keterangan

An. Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Papua,
Pejabat Penanda Tangan SPM TA. 2016



ir. Muflin Nggobe, M.Si ✓
NIP. 196208181990031001



SURAT PENYATAAN PEMOTONGAN GAJI/TUKIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Alexander Beding, SP, M.Sc
NIP : 196607081998031001
Jabatan : Peneliti Muda
Alamat : Jalan Yahim Nomor 49 Sentani Jayapura.

Berdasarkan surat Kepala BPTP Papua Nomor B.68.4/PW.140/ H.12.28/2/2018 dan B.68.5/PW.140/ H.12.28/2/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 dalam rangka menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Audit Kinerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian nomor : R.299/PW.130/G.4/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 terkait dengan kelebihan pembayaran Jabatan Fungsional sebesar Rp.15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja senilai Rp.18.905.000 (delapan belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga total kerugian Negara senilai Rp.34.555.000 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia gaji/tunjangan kinerja (Tukin) dipotong senilai Rp.34.555.000 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dipotong selama 40 (empat puluh) bulan, setiap bulan dipotong sebesar Rp.863.875 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sentani, 10 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Petrus Alexander Beding, SP, M.Sc
NIP 196607081998031001



SURAT PENYATAAN PEMOTONGAN GAJI/TUKIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adnan, SP, M.Si
NIP : 198012212008011006
Jabatan : Peneliti Pertama
Alamat : Jalan Yahim Nomor 49 Sentani Jayapura.

Berdasarkan surat Kepala BPTP Papua Nomor B.68.4/PW.140/ H.12.28/2/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 dalam rangka menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Audit Kinerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian nomor : R.299/PW.130/G.4/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 terkait dengan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp.17.860.000 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia gaji/tunjangan kinerja (Tukin) dipotong senilai Rp. 17.860.000 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan dipotong selama 17 (tujuh belas) bulan, setiap bulan dipotong sebesar Rp.1.050.589 (satu juta lima puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sentani, 10 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Adnan, SP, M.Si
NIP 198012212008011006